

# Tak Buat LPj, Desa Jangan Diberi Bantuan

**SEMARANG** - Pemprov Jateng didesak agar tidak memberikan bantuan keuangan bagi desa yang sampai saat ini belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk anggaran 2014. Dari 8.765 desa, baru 67 persen yang menyerahkan laporan.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso, program bantuan keuangan untuk desa seharusnya dirancang sejak awal. Jumlah alokasi anggaran juga harus sesuai dengan kondisi desa, karena tiap desa kondisinya berbeda.

"Jumlah bantuan yang diberikan harus berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya.

Sekretaris Daerah Pemprov Jateng, Sri Puryono memutuskan, pihaknya mendesak para bupati agar meminta kepala desa untuk menyelesaikan LPj bantuan keuangan 2014.

Jika tidak segera diselesaikan, pemprov akan mempertimbangkan ulang apakah desa tersebut akan diberi bantuan keuangan atau tidak.

"Kami sudah berkali-kali mengingatkan, kalau tidak dilaporkan tepat waktu bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Paling lambat Januari 2015," tutuhnya.

Sampai saat ini, alasan kepala desa belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban belum diketahui secara pasti.

"Saya belum tahu. Mungkin karena faktor minimnya sumber daya manusia dan malas untuk melaporkan," terangnya.

## Tiga Kategori

Bantuan keuangan yang diterima pemerintah desa terbagi atas tiga kategori. Untuk desa yang kurang berkembang menerima Rp 100 juta, desa cukup berkembang Rp 60 juta, dan Rp 40 juta untuk desa yang sudah maju. Total yang diberikan sebanyak Rp 435 miliar.

"Bantuan dana desa sebagai stimulus atas implementasi Undang-Undang desa, di mana setiap desa akan mendapat anggaran Rp 1 miliar dari pemerintah pusat," urainya.

Bantuan keuangan desa digunakan untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur desa seperti jalan, saluran drainase, dan gorong-gorong.

Meskipun pelaporan keuangan desa belum beres, namun dalam APBD 2105 Pemprov Jateng kembali menganggarkan bantuan keuangan untuk desa sebanyak Rp 347 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk 45 desa. Bagi desa berdiskon masing-masing akan mendapatkan Rp 100 juta. Sedangkan desa lainnya ada yang mendapatkan Rp 40 juta dan Rp 50 juta.

"Bantuan desa dari pemerintah pusat hanya sedikit. Meski Undang-Undang mengamanahkan Rp 1 miliar per desa, tapi pada tahun ini hanya dialokasikan rata-rata Rp 135 juta per desa. Kemampuan keuangan negara baru segitu," kata Puryono. (J8,H81-90)